



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERMASALAHAN PENURUNAN *LIFTING* MINYAK DAN GAS BUMI

Juli Panglima Saragih
Analisis Legislatif Ahli Madya
juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setiap tahun DPR RI dan pemerintah menetapkan target produksi siap jual (*lifting*) minyak dan gas bumi (migas) dalam APBN. Pada tahun 2023 lalu, target *lifting* migas dalam APBN ditetapkan sebesar 660.000 barel per hari atau *barrel oil per day* (BOPD) untuk minyak mentah dan sebesar 1.100.000 barel setara minyak per hari atau *barrel oil equivalent per day* (BOEPD) untuk gas bumi. Namun sampai dengan akhir Desember tahun 2023, realisasi *lifting* minyak mentah hanya mencapai 605.500 BOPD dan realisasi *lifting* gas bumi hanya mencapai 964.000 BOEPD. Raihan positif didapatkan pada tingkat *Reserves Replacement Ratio* (RRR) atau rasio antara cadangan migas baru yang didapatkan dengan cadangan migas yang diproduksi, di mana sepanjang tahun 2023 mencapai 123,5%. Dalam APBN Tahun Anggaran 2024, DPR RI dan pemerintah menyepakati target *lifting* minyak mentah sebesar 635.000 BOPD dan target *lifting* gas bumi sebesar 1.033.000 BOEPD.

Penurunan *lifting* migas pada tahun 2023 lalu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu *pertama*, keterlambatan produksi migas di beberapa proyek besar dari beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). *Kedua*, mewabahnya Covid-19 (yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi) sejak akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 yang membuat sebagian besar KKKS harus melakukan penyesuaian ulang di Wilayah Kerja (WK) migas masing-masing. *Ketiga*, pengurangan tenaga kerja akibat pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan di lapangan (hulu) menjadi tidak efisien, seperti penundaan kegiatan hulu hingga 1 sampai dengan 5 minggu dari rencana awal. *Keempat*, beberapa tahun terakhir sejak tahun 2019, permintaan (konsumsi) terhadap BBM termasuk gas bumi menurun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan (*clean air*). *Terakhir*, beberapa sumur migas yang dikelola oleh KKKS ada yang sudah berumur 25-50 tahun sehingga produksi tidak dapat lagi optimal.

Terkait dengan *lifting* migas, SKK Migas menjelaskan bahwa realisasi investasi migas di hulu untuk semester I tahun 2023 mencapai USD5,7 miliar. Sedangkan realisasi satu tahun (2023) mencapai USD15,5 miliar di mana pada Desember tahun 2023 merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar USD2,571 miliar. Tahun 2022 lalu realisasi investasi migas di hulu hanya sebesar USD12,1 miliar. Salah satu solusi untuk menjaga kestabilan atau meningkatkan produksi migas ke depan adalah dengan penggunaan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR) terhadap sumur migas yang relatif tua. Namun, tidak semua KKKS merencanakan EOR sejak awal produksi (setelah eksplorasi). Akibatnya, biaya untuk EOR menjadi mahal dan menambah beban perusahaan.

Isu yang berkembang terkait dengan *lifting* migas adalah adanya sebagian KKKS yang mengajukan peralihan dari skema *gross split* ke skema *cost recovery*. Beberapa KKKS dengan skema *gross split* mengalami kesulitan produksi karena sumur migas tidak ekonomis. Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan mengeluarkan regulasi baru menggantikan Peraturan

Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, yang memberikan keleluasaan KKKS untuk beralih dari skema *gross split* ke skema *cost recovery*.

Atensi DPR

DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor energi harus terus mengingatkan pemerintah untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan penurunan *lifting* migas yang terus terjadi setiap tahun, yang mana target *lifting* migas selalu tidak tercapai. Komisi VII DPR RI juga perlu mempertanyakan strategi jangka pendek pemerintah untuk mencapai produksi migas 1 juta BOPD pada tahun 2030. Jika perlu, Komisi VII DPR RI dapat mendorong pemerintah agar KKKS diberi ruang fleksibilitas dalam memilih sistem bagi hasil produksi dan/atau menggunakan teknologi yang dapat menambah produksi migas di luar teknologi EOR, sebelum memulai tahap eksploitasi/produksi. Komisi VII DPR RI juga harus terus mendesak pemerintah untuk menambah kegiatan eksplorasi migas atas cadangan migas yang sudah terbukti (*proven reserves*) untuk mengalkulasi berapa potensi migasnya.

Sumber

Bisnis Indonesia, 17 Januari 2024;
cnbcindonesia.com, 16 Januari 2024;
esdm.go.id, 20 Juli 2023; dan
Kontan, 17 Januari 2024.